

ABSTRAK

TANGGUNGJAWAB BUMN DIKAITKAN DENGAN EKSEKUSI PUTUSAN PERSAINGAN USAHA LINTAS BATAS NEGARA YANG MEWAJIBKAN PEMBAYARAN GANTI RUGI

Dian Naomi Natarida

1687047

Dengan semakin meluasnya persaingan bisnis secara global, hukum persaingan dan lembaga penegak hukumnya yaitu KPPU menemukan hambatan apabila terdapat pelaku usaha asing melakukan monopoli di Indonesia atau pelaku usaha Indonesia digugat pengadilan asing, karena Pasal 436 RV mengandung asas teritorial. Lebih rumit lagi ketika pelaku usaha yang digugat tersebut adalah BUMN. Karena, BUMN mempresentasikan kepemilikan negara. Untuk itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keberlakuan putusan asing di dalam sistem peradilan Indonesia dan untuk mengetahui bentuk tanggungjawab kerugian yang dialami oleh BUMN dalam menjalankan putusan asing tersebut.

Penelitian hukum yuridis normatif ini dilakukan dengan tipe penelitian preskriptif melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder dan pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Selanjutnya, data diolah dan dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Indonesia harus menunjukkan komitmen untuk tunduk dan mentaati hukum persaingan usaha di negara di mana perusahaan milik BUMN menjalankan kegiatan usahanya dan kerugian yang diakibatkan menjadi kerugian BUMN bukan kerugian negara. Menurut Pasal 436 RV, akibat hukum tidak dapatnya putusan asing dieksekusi adalah harus dijadikannya putusan tersebut menjadi bukti untuk digugat kembali ke pengadilan Indonesia. Selain itu, hambatan untuk KPPU menggugat pelaku usaha asing karena terbatas pada prinsip teritorial yang terdapat pada definisi pelaku usaha.

Kata Kunci: Putusan Asing, Persaingan Usaha, BUMN, Pertanggungjawaban

ABSTRACT

THE RESPONSIBILITY OF THE STATE-OWNED ENTERPRISE (BUMN) ASSOCIATED WITH THE EXECUTION OF A CROSS BORDER BUSINESS COMPETITION REQUIRING COMPENSATION PAYMENTS

Dian Naomi Natarida

1687047

With the widespread business competition globally, the law of competition and its law enforcement agency KPPU find obstacles when there are foreign businesses doing monopoly in Indonesia or Indonesian business actors sued foreign courts, Because article 436 Rv contains territorial principles. It is more complicated when the perpetrators who are sued are State-Owned Enterprise (BUMN). Because, BUMN presents state ownership. Therefore, the purpose of this research is to analyze the applicability of foreign decisions in the Indonesian judicial system and to know the form of responsibility for losses suffered by state-owned enterprises in carrying out the foreign decision.

This normative juridical legal research is conducted with a type of prescriptive study through a legal approach and a conceptual approach. The data used is secondary data and data collection is done with the study of the library. Furthermore, data is processed and analyzed qualitatively.

Based on the results of research obtained that Indonesia must demonstrate a commitment to submit and obey the laws of competition in the country where the company belongs to state enterprises running its business activities and losses caused by the loss of state-owned enterprises Loss of state. According to article 436 RV, the result of the law is not able to execute a foreign ruling is to be to the ruling is proof to be sued back to the Indonesian court. In addition, the barriers to KPPU sued foreign businessmen because it is limited to the territorial principle found in the definition of business actors.

Keywords : Foreign Court Decision, Business Competition, BUMN, Responsibility

DAFTAR ISI

	HALAMAN
PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
PERSETUJUAN REVISI TUGAS AKHIR.....	iv
PERNYATAAN LAPORAN PENELITIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Pemikiran.....	12
1. Kerangka Teoritis.....	12
2. Kerangka Konseptual	16
F. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Sifat Penelitian	18
3. Pendekatan Penelitian.....	19
4. Jenis Data.....	19
5. Teknik Pengumpulan.....	20
6. Teknik Analisis Data	21
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II KEDUDUKAN PELAKU USAHA ASING DALAM PERSAINGAN USAHA DI SUATU NEGARA DAN KETERKAITANNYA TENTANG STATUS BUMN.....	23

A. Kedudukan Pelaku Usaha Asing Dalam Persaingan Usaha Di Suatu Negara	23
1. Pengaturan Persaingan Usaha di Beberapa Negara Secara Umum	23
2. Pengertian Pelaku Usaha	30
3. Perkara Persaingan Usaha Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Asing di Suatu Negara.....	35
B. Kepemilikan Saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN).....	40
BAB III TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PUTUSAN ASING DI SUATU NEGARA.....	43
A. Tinjauan Hukum Atas Yurisdiksi Suatu Negara.....	43
1. Pengertian Yurisdiksi	43
2. Prinsip-Prinsip Yurisdiksi Secara Umum.....	47
B. Tinjauan Hukum Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing.....	52
1. Pengertian Putusan Pengadilan	52
2. Pengaturan Pelaksanaan Putusan Asing di Indonesia.....	54
3. Hambatan dalam Pelaksanaan Putusan Asing di Indonesia	60
BAB IV ANALISIS TANGGUNGJAWAB BUMN DIKAITKAN DENGAN EKSEKUSI PUTUSAN PERSAINGAN USAHA LINTAS BATAS NEGARA YANG MEWAJIBKAN PEMBAYARAN GANTI RUGI	65
A. Tanggungjawab Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Menjalankan Isi Putusan Pengadilan Lintas Batas Yang Mewajibkan Membayar Ganti Rugi	65
B. Akibat Hukum Dari Putusan Pengadilan Asing Dalam Perkara Persaingan Usaha Lintas Batas Negara Ditinjau Dari Hukum Indonesia	74
C. Kewenangan Pengambilan Putusan Persaingan Usaha Lintas Batas Dikaitkan Dengan Proses Eksekusi Putusan Persaingan Usaha Asing	79
PENUTUP.....	90
A. Simpulan.....	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93